



KALAM, p-ISSN: 0853-9510 e-ISSN: 2540-7759
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM>
Volume 10, No. 2, Desember 2016, halaman 403 – 422

Toleransi Beragama di Era “Bandung Juara”

Agus Ahmad Safei

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
agus.safei@uinsgd.ac.id

Abstrak

Pergantian kepemimpinan di Kota Bandung dari Walikota sebelumnya, Dada Rosada, ke Walikota sekarang, Ridwan Kamil, menghadirkan nuansa yang berbeda, meski dalam beberapa hal ditemukan sejumlah titik yang sama. Hal demikian dipandang sebagai sesuatu yang normal saja, karena setiap pemimpin memiliki gaya, selera dan visi-misi masing-masing. Jika Dada Rosada tampil memimpin Bandung dengan semangat menjadikan Bandung sebagai Kota Agamis, dengan menekankan pentingnya toleransi antarumat beragama, maka Ridwan Kamil lebih memilih spirit Bandung Juara sebagai tagline utama kepemimpinannya, dengan tetap menekankan Bandung sebagai ‘rumah bersama’ semua umat beragama. Ridwan Kamil secara sadar tidak memakai bahasa agama di ruang publik sebagaimana halnya yang dilakukan Walikota sebelumnya, Dada Rosada. Dalam pendekatan esensialisme yang diusung Walikota sekarang, yang terpenting bukanlah membawa-bawa agama dalam setiap program yang diusung ke ruang publik, terpenting adalah justru mengimplementasikan nilai-nilai yang dikandung agama itu sendiri melalui berbagai program yang nyata-nyata memberikan manfaat kepada warga kota.

Abstract

The succession of leadership in Bandung City from Dada Rosada, the previous Mayor, to Ridwan Kamil, the current Mayor, creates a different atmosphere in many aspects of life in the city. However, there are some points in which the two leaderships are similar. This phenomenon is considered normal because each leader has distinctive style, preference, vision, and missions. While Dada Rosada led Bandung with the spirit to make

Bandung a Religious City, focusing on religious tolerance, Ridwan Kamil prefers the spirit of Bandung Juara (Bandung the Champion) as the tagline of his leadership. While keep stressing on the effort to make Bandung a 'shared home' of all religion, Ridwan Kamil deliberately avoids using religious terms and expressions in public space, as Dada Rosada had done. In the essentialism approach the current Mayor of Bandung City implements, the most important thing is not bringing religion in every public programs. Instead, the most important thing is the implementation of religious values through various programs that provide clear benefits to the public works.

Keyword: Toleransi, Agama, Ruang Publik, Agamis, Bandung Juara

A. Pendahuluan

Menampilkan fungsi agama sebagai berkah bagi umat manusia, salah satunya, dapat diekspresikan melalui penghadiran kesadaran toleransi beragama. Toleransi beragama merupakan salah satu parameter yang dapat dipakai untuk mengukur level kemajuan, keadaban dan peradaban sebuah bangsa. Dengan demikian, semakin toleran sebuah bangsa, tingkat kemajuan, keadaban publik dan peradabannya akan maksimal pula. Dalam pandangan Michael Walzer,¹ toleransi merupakan keniscayaan dalam ruang individu dan ruang publik karena muara akhir dari toleransi beragama adalah membangun hidup damai (*peaceful co-exsistance*) di antara pelbagai kelompok masyarakat yang berbeda keyakinan, latar belakang sejarah, kebudayaan, bahasa, dan identitas.

Dengan begitu, toleransi harus mampu membentuk kemungkinan-kemungkinan sikap, antara lain sikap untuk menerima perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keragaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi pihak lain, dan mendukung secara antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan. Sampai saat ini, upaya membangun kehidupan beragama yang toleran dan damai masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya selesai. Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Moderate Muslim Society,² menunjukkan, bahwa

¹ Michael Walzer, *On Toleration*, (New Haven: Yale University, 1997).

² Zuhairi Misrawi, *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*, (Jakarta: Kompas, 2010).

Provinsi Jawa Barat menempati urutan tertinggi dalam aksi intoleransi. Sementara, data Setara Institute (2015), menunjukkan bahwa kasus intoleransi itu terutama berada dalam domain agama.³

Pada dasarnya, terjadinya kontestasi dan kompetisi antarkelompok keagamaan atau konflik yang bernuansa agama merupakan sifat dasar manusia. Apalagi kontestasi yang terjadi di kalangan pemeluk agama yang berkarakter dakwah atau misionaris, seperti halnya Kristen dan Islam. Secara alamiah, manusia sejak kelahirannya sampai dewasa memiliki potensi konflik, baik konflik antara anak dengan orang tua, suami dengan istri, kelompok yang satu dengan yang lainnya, termasuk konflik antaretnik dan antarumat beragama. Konflik-konflik itu berlangsung ada yang muncul secara spontan dan ada pula yang direkayasa karena berbagai kepentingan.

Secara empirik, realitas kehidupan beragama di Indonesia tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan entitas negara. Situasi ini yang kemudian mendorong lahirnya berbagai regulasi atau kebijakan bernuansa agama yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah umumnya dimaksudkan untuk mengatur kehidupan umat beragama.

Dalam konteks relasi lintas agama, regulasi itu dimaksudkan untuk melakukan “upaya pendamaian” terhadap perselisihan antarumat beragama, terutama yang menyangkut penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Semua itu diorientasikan pada satu upaya untuk membangun integrasi yang bersifat lintas agama. Pada masa pemerintahan Walikota Bandung Dada Rosada (2003-2013),

³ Laporan Setara Institute (2015) menyebutkan, bahwa enam dari sepuluh kota di Indonesia yang paling tidak toleran berada di Provinsi Jawa Barat. Dan, yang lebih mengejutkan lagi, salah satu dari daftar kota paling tidak toleran di Indonesia itu adalah Kota Bandung yang selama ini dikenal adem ayem. Menurut Setara Institute, sepuluh kota di Indonesia yang masuk kategori paling tidak toleran adalah: Bogor, Bekasi, Banda Aceh, Tangerang, Depok, Bandung, Serang, Mataram, Sukabumi, dan Tasikmalaya. Sementara, sepuluh kota yang dinilai paling toleran adalah: Pematang Siantar, Salatiga, Singkawang, Manado, Tual, Sibolga, Ambon, Sorong, Pontianak, dan Palangkaraya. Lebih jauh tentang ini, dapat dilihat dalam “Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2015”, (Jakarta: Setara Institute), Website: <https://id.scribd.com/document/326224645/Indeks-Kota-Toleran-2015-Setara-Institute>, diakses tanggal 21 Januari 2016.

komitmen keagamaan semacam itu tampak ditunjukkan dengan menjadikan pembangunan bidang agama sebagai salah satu agenda prioritas melalui perwujudan “Bandung Agamis”.

Hal menarik yang bisa ditelaah lebih jauh adalah penggunaan istilah “agamis” dan bukan penggunaan kata lain, misalnya “Islami”, yang selama ini menjadi kecenderungan dominan yang terjadi di sejumlah daerah. Berbeda dengan Kota Bandung yang menggunakan istilah “agamis”, beberapa kabupaten dan kota di Indonesia menggunakan istilah “Syari’at Islam” dalam program pembangunan daerahnya.⁴

Kelahiran program Bandung Agamis di era kepemimpinan Walikota Dada Rosada tampaknya diilhami oleh kenyataan sebagian besar warga kota Bandung yang memiliki keyakinan dan kepatuhan beragama cukup kental, sehingga potensi keberagaman dapat dijadikan salah satu kemampuan, kekuatan, kesanggupan, dan daya yang dimiliki warga Kota Bandung bisa dikembangkan, digali, dan dijadikan sebagai sarana untuk membangun Kota Bandung. Selain itu, program ini juga dirancang untuk mewujudkan sebuah visi keagamaan, yakni terciptanya sikap toleransi dan kerukunan hidup intern umat beragama, antarumat beragama, antaretnik, serta antarumat beragama dan etnik dengan pemerintah yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Dengan demikian, hasil akhir yang diharapkan dari adanya program ini adalah terciptanya suasana kehidupan beragama yang toleran, rukun, damai, dan dapat bekerja sama antara satu dengan yang lain. Secara teknis, penggunaan istilah “agamis” dalam salah satu program prioritas Kota Bandung ini dianggap tepat karena mampu meminimalisir lahirnya pro-kontra di masyarakat. Dengan istilah ini, pro-kontra tidak lagi menemukan relevansinya karena istilah “agamis” konotasinya cenderung lebih bersifat netral dan bisa diterima oleh semua penganut agama. Dalam konsep Bandung Agamis, semua agama diakui eksistensinya.

⁴ Robin Bush, “Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?” dalam Greg Fealy dan Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia* (Canberra: Australian National University, 2008).

⁵ Julian Millie dan Agus Ahmad Safei, “Religious Bandung”, *Inside Indonesia a Quarterly Magazine on Indonesia*, 2010, h. 124.

Tahun 2013, terjadi pergantian kepemimpinan di Kota Bandung dari Walikota Dada Rosada ke Ridwan Kamil. Pergantian kepemimpinan ini rupanya diikuti pula oleh perbedaan atau pergeseran gaya kepemimpinan dari dua Walikota yang berbeda ini. Jika Dada Rosada, sesuai dengan *tagline* kepemimpinannya, yakni Bandung Agamis, banyak menggandeng para tokoh agama dengan mengusung isu utama membangun toleransi beragama, maka Walikota Bandung Ridwan Kamil, dengan *tagline* kepemimpinannya, yakni Bandung Juara, lebih memilih kosakata yang tidak “berbau” agama dengan misi utama menjadikan Bandung sebagai kota juara dalam pengertian yang sangat luas.

Menarik diteliti bagaimana nasib toleransi beragama di Kota Bandung di bawah dua Walikota yang berbeda dengan dua gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Khususnya terkait dengan gaya kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil yang tidak lagi memakai “bahasa agama” dalam *tagline* pemerintahannya, seperti halnya yang dilakukan oleh Walikota sebelumnya, Dada Rosada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif, untuk menggambarkan fenomena toleransi beragama di Kota Bandung, dengan variabel pengamatan kepada hal-hal yang telah ditentukan secara spesifik. Data yang bersifat non-dokumenter diperoleh melalui observasi terlibat dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif.

B. Agama di Ruang Publik

Dalam kurun waktu lama, agama dengan seluruh bentuk ekspresinya di ruang publik telah menjadi bahan penelitian para ahli. Secara historis, agama merupakan salah satu bentuk legitimasi paling efektif. Dalam konteks kajian sosiologi, agama tidak didefinisikan sebagai perangkat ajaran yang bersifat mutlak yang datang dari Tuhan sebagaimana sering dipahami oleh ahli-ahli agama. Dalam kajian sosiologi, agama lebih dilihat sebagai bagian dari kebudayaan. Tujuan penggunaan batasan agama sebagai bagian dari kebudayaan adalah untuk kepentingan analisis agama dalam kaitannya dengan bagian lain dalam kebudayaan masyarakat, sehingga tampak dinamikanya dalam mewujudkan harmoni dan toleransi atau pun disharmoni dan intoleransi dalam masyarakat.

Kajian tentang agama tampak menjadi semakin menarik ketika ia kemudian ditarik ke wilayah publik. Agama menjadi tampak saling berebut ruang dengan negara dalam menjalankan perannya di ruang publik. Dalam konteks Indonesia, wacana agama di ruang publik tampak masih menjadi isu yang seksi untuk diteliti.

Dalam konteks ini pula, Bernhadr Platzdasch dan Johan Saravanamuttu,⁶ menelaah dinamika toleransi dan konflik yang terjadi dan dipicu oleh adanya keragaman keyakinan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Berbagai konflik yang muncul terjadi secara begitu saja dan ada pula yang direkayasa oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan agenda tersendiri. Bagi kedua ahli ini, keragaman keyakinan yang ada di tengah masyarakat dapat menjadi modal untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis, sambil pada saat bersamaan juga dapat menjadi pemicu munculnya sejumlah konflik bernuansa agama.

Dalam pandangan Yudi Latif,⁷ agama dan negara bukanlah dua entitas yang secara diametral harus diperhadapkan. Baik agama maupun negara bisa mengembangkan perannya di ruang publik tanpa perlu saling meniadakan, sejauh masing-masing menjalankan peran dan fungsinya secara tepat dan proporsional. Agama, dengan demikian, tidak harus berdesakan dengan negara dalam ikhtiar mengatur ruang publik. Agama bisa menjadi landasan moral untuk menopang maupun menentang kekuasaan politik.

Agama muncul tidak hanya menjadi modal spiritual di tengah masyarakat, tetapi menjadi modal sosial untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Kenyataan ini tampaknya sejalan dengan pandangan Josê Cassanova,⁸ yang menyatakan bahwa agama dapat melakukan transformasi sosial dengan melakukan deprivatisasi agama, yakni proses di mana agama

⁶ Bernhadr Platzdasch dan Johan Saravanamuttu, *Religious Diversity in Muslim-majority State in Southeast Asia: Areas of Toleration and Conflict*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014). Kajian serupa juga dilakukan oleh, misalnya, Tod Jones, sebagaimana dapat dibaca dalam bukunya, *Culture, Power and Authoritarianism in the Indonesian State*, (Singapore: ISEAS, 2013).

⁷ Yudi Latif, *Tuhan Tidak Partisan: Melampaui Sekularisme dan Fundamentalisme*, (Jakarta: Syabas Book, 2013), h. 96

⁸ Jose Cassanova, *Public Religions in the Modern World*, (Chicago: University of Chicago Press, 1994).

meninggalkan ruang privat dan memasuki ruang publik guna mengambil peran dan memainkan fungsi sosialnya.

Sejalan dengan pandangan Cassanova, Yudi Latif juga menyatakan bahwa ide-ide keagamaan boleh saja menginspirasi ruang publik selama didasarkan pada rasionalitas publik, dan diekspresikan dalam bentuk yang universal sehingga bisa diterima semua pihak. Dalam kaitan ini, Yudi Latif percaya bahwa Pancasila sesungguhnya telah menjadi pondasi yang kokoh bagi terjalinnya relasi yang sehat antara agama dan negara.⁹

Dalam konteks Indonesia, Pancasila sesungguhnya telah menjadi “rumah bersama” yang dapat berfungsi sebagai payung keragaman agama, etnis dan kebudayaan yang ada di seluruh Nusantara. Dengan demikian, menurut Yudi Latif,¹⁰ Pancasila dapat disebut sebagai tafsir keragaman dengan level adaptasi sangat tinggi terhadap multikulturalisme, selaras dengan kenyataan begitu beragamnya orang Indonesia. Karena itu, Irfan Noor,¹¹ mengatakan bahwa dalam konteks Indonesia, politik identitas berbasis agama masih menjadi isu yang tetap relevan, kendati dengan takaran yang tidak sekuat pada awal-awal masa reformasi.

Zainuddin Maliki¹² melakukan kajian menarik tentang agama sebagai sumber daya politik penguasa lokal. Di balik penggunaan agama sebagai sumber daya politik, atau *religio-political power*, yang artikulasinya dalam bentuk pengambilan simbol-simbol agama sebagai sarana kekuasaan itu menyimpan persoalan yang perlu dikaji secara cermat. Dalam kaitan ini, Zainuddin Maliki secara lebih jauh meneliti tentang bagaimana elit politik lokal mengekspresikan konstruksinya atas nilai keagamaan dan nilai-nilai kultural dalam proses politik birokrasi pemerintahan dengan segala aturan prosedural dan legal rasional, yang tengah memasuki masa transisi pascareformasi; bagaimana elit politik dalam birokrasi pemerintah memanfaatkan agama sebagai sarana kekuasaan di

⁹ Yudi Latif, *Tuhan Tidak Partisan...*, h. 99.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Irfan Noor, “Identitas Agama, Ruang Publik dan Postsekularisme: Perspektif Diskursus Jurgen Habermas”, *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol 11, No 1, 2012.

¹² Zainuddin Maliki, *Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan Penguasa*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004).

tengah masyarakat yang distruktur oleh sumber imajinasi, ide, nilai dan sistim pengetahuan keagamaan (Islam) yang terus meluas, serta pada gilirannya dipertanyakan, apakah pengambilan agama hanya terkait dengan fungsi agama sebagai sumber pencarian kuasa wibawa saja, atau juga sebagai sumber nilai atau dasar kultural dalam menjalankan kekuasaan.

Sementara itu, Gusti A.B. Menoh¹³ menelaah tentang agama dan ruang publik dari sudut pandang Jurgen Habermas. Menurut Menoh, dalam negara demokratis, agama memiliki peran penting sebagai sumber pencerahan sekaligus memberikan keadaban dalam ruang publik. Dalam konteks ini, relijiusitas, khususnya pada masyarakat modern, tetap menjadi sesuatu yang dipandang penting. Bagi Menoh, dengan mengutip pandangan Habermas, pasca rasionalitas akal budi, agama tetap menjadi elemen penting dalam sebuah negara.

Dalam pemikiran Habermas, sebagaimana dikutip Menoh, marwah agama adalah sumber keadaban sebuah negara. Dengan begitu, agama tampil dalam ruang ruang publik sebagai sumber nalar keadaban (*publik use of reason*). Lebih jauh, Habermas menyatakan bahwa ruang publik harus menjadi lokus penyatuan yang bisa meredakan konflik-konflik, klaim-klaim yang saling berlawanan serta perbedaan-perbedaan yang tak dapat diselesaikan.

Dengan demikian, dalam ruang publik informal, alasan-alasan dan ekspresi-ekspresi keagamaan masing-masing kelompok boleh dikemukakan. Pada ruang publik informal seperti itu, setiap warga belajar kosakata dan khazanah kekayaan tradisi masing-masing agama yang sangat beragam dan bermanfaat bagi ikhtiar membangun kehidupan bersama. Namun, dalam konteks ruang publik formal, wacana agama harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa diterima semua komunitas agama.

Sampai di sini, dapat dikatakan bahwa ruang publik berfungsi melindungi pluralitas budaya dan keragaman keyakinan sehingga tercipta saling pengertian dan saling belajar di antara mereka, khususnya antara warga sekuler dan warga relijius.

¹³ Gusti A.B. Menoh, *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2015), h. 109.

Dari berbagai kajian yang dilakukan oleh para ahli tadi, sejauh yang diketahui, tampak belum ada –atau belum banyak--kajian empirik yang secara spesifik membahas tentang bagaimana memperlakukan agama di ruang publik dari pendekatan formalisme ke esensialisme, seperti hanya yang dilakukan oleh kajian ini. Karenanya, paper ini diharapkan berguna untuk mengisi dan sekaligus memperkaya kajian tentang, khususnya, pergeseran penggunaan bahasa agama di ruang publik terkait dengan ikhtiar membangun toleransi beragama di tengah-tengah masyarakat.

C. Dari Formalisme ke Esensialisme

Masyarakat Kota Bandung tergolong masyarakat urban, terbuka, dan heterogen secara etnik, budaya ataupun agama. Heterogenitas ini muncul diakibatkan laju urbanisasi, tersedianya pelayanan pendidikan, pekerjaan, dan ditambah dengan masuknya berbagai etnis. Pertumbuhan dan penyebaran penduduk, khususnya di lingkungan perkotaan, telah mendorong masyarakat menghadapi kenyataan perbedaan beragama dan budaya yang semakin kompleks. Kenyataan yang tidak bisa dihindari ini pada gilirannya dapat mencair melalui proses adaptasi dalam aktivitas sosial untuk saling memahami.

Kota Bandung merepresentasikan keragaman etnik dan keyakinan yang sangat kaya. Secara asumtif, fakta ini akan melahirkan dinamika relasi antarumat lintas agama yang tinggi. Dengan bergumuhnya keragaman agama dan etnik dalam suatu wilayah yang relatif sempit, sangat dimungkinkan terjadinya friksi dan kompetisi, termasuk friksi dan kompetisi antarkelompok keagamaan. Dalam perspektif sosiometrik, fakta ini menjadi bahan kajian menarik, khususnya menyangkut pola relasi antarkelompok keagamaan.

Pergantian kepemimpinan di Kota Bandung dari Walikota sebelumnya, Dada Rosada, ke Walikota sekarang, Ridwan Kamil, tak bisa dipungkiri telah menghadirkan suasana dan warna yang berbeda, meski dalam beberapa hal ditemukan sejumlah titik yang beririsan. Hal demikian adalah sesuatu yang normal saja, karena setiap pemimpin pasti memiliki karakter, gaya, selera dan pendekatan yang berbeda-beda. Jika Dada Rosada tampil memimpin Bandung dengan semangat menjadikan Bandung

sebagai Kota Agamis, dengan menekankan pentingnya toleransi beragama, maka Ridwan Kamil lebih memilih spirit Bandung Juara sebagai *tagline* utama kepemimpinannya, dengan tetap menekankan Bandung sebagai ‘rumah bersama’ semua umat beragama. Ridwan Kamil secara sadar tidak memakai bahasa agama di ruang publik sebagaimana halnya yang dipakai Dada Rosada.

Tetapi, secara substansi, semangat yang dibawanya relatif tidak jauh berbeda, yakni menjadikan Bandung sebagai kota juara: juara bersihnya, juara toleransinya, juara ramahnya, juara segalanya. Dengan pilihan jargon kepemimpinannya yang mengusung Bandung Agamis, Dada Rosada lebih banyak bersentuhan dan berinteraksi dengan para tokoh lintas agama di Kota Bandung. Sementara, Ridwan Kamil, karena latar belakangnya sebagai arsitek, ia banyak melibatkan para arsitek pula, tak hanya dari Indonesia tapi juga dari berbagai negara, untuk membantunya menata kota Bandung. Selain itu, seperti diakuinya dalam acara silaturahmi ulama umaro (11 September 2014), ia merasa bahwa wakil Walikota Bandung, Ahmad Danial atau Mang Oded, dianggap lebih tepat untuk berbicara dan mengurus masalah yang bersifat keagamaan karena berasal dari partai berbasis agama, yakni PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Perbedaan gaya kepemimpinan antara Dada Rosada dengan Ridwan Kamil dalam memimpin Kota Bandung dapat dilihat dalam berbagai program yang mereka usung. Sebagai contoh, dalam berbagai acara silaturahmi yang dihadiri para tokoh lintas agama, Dada Rosada kerap bercerita dan mengeluhkan betapa kotornya toilet-toilet di rumah para tokoh agama yang dia kunjungi. Padahal para tokoh agama ini yang paling paham tentang dalil pentingnya hidup bersih. Tetapi Dada Rosada tidak pernah mengusung suatu program khusus bagaimana kebersihan toilet-toilet di Kota Bandung ini bisa ditingkatkan.

Hal demikian tampak berbeda dengan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Sekalipun tidak pernah membawa-bawa dalil agama, Ridwan Kamil bergerak cepat dengan merancang dan melaksanakan program yang diarahkan untuk langsung meningkatkan kebersihan toilet-toilet yang ada kota Bandung secara nyata. Seperti, mengadakan dan meresmikan ratusan toilet sekelas toilet hotel bintang tiga di sekolah-sekolah yang ada di

Bandung. Selain itu, Ridwan Kamil juga merekrut ratusan tukang sapu jalanan, yang bertugas untuk membersihkan ruas-ruas jalan di Bandung. Bahkan, para pengemis yang biasa mangkal di perempatan lampu merah direkrut dan dijadikan sebagai tim kebersihan kota.

Atas usaha itu, Pemerintah Kota Bandung pun kemudian diganjar dengan Piala Adipura, pada bulan November 2015. Kota Bandung meraih Piala Adipura setelah 17 tahun menunggu. Sejak dilantik menjadi Walikota, 2013, Ridwan Kamil telah menggagas 40 lebih program baru untuk memastikan Bandung bisa bersih dan lestari. Diraihnya Piala Adipura ini adalah apresiasi tertinggi dari negara sebagai wujud dari ajaran agama tentang “kebersihan itu bagian dari iman”.

Sementara, terkait isu transparansi pada masa pemerintahan Walikota Ridwan Kamil, pertengahan bulan November 2015, dari puluhan kota di dunia, Kota Bandung masuk menjadi finalis 6 besar untuk inovasi *Smart City* dari World Smart City Organization di Barcelona, Spanyol. Keenam kota di dunia yang masuk enam besar, selain kota Bandung, adalah Moskow, Dubai, Buenos Aires, Curitiba, dan Peterborough. Kota Bandung mendapat apresiasi yang luar biasa karena dipandang memberikan banyak ruang bagi warga kota untuk berinteraksi secara aktif dalam mengawasi pembangunan dan perkembangan kota melalui inovasi “*Connected Citizens: Encouraging Participatory Governance*”.

Inisiasi ini wujud dari prinsip transparansi yang diterapkan Walikota Bandung Ridwan Kamil. Contoh-contoh dari penerapan prinsip transparansi ini adalah: *citizen complain online*, rapor camat atau lurah oleh warga, monitoring program Pemkot, perizinan online, komunikasi aktif warga melalui akun twitter dinas, dan lain-lain. Prinsip transparansi ini adalah implementasi dari apa yang dalam ajaran agama Islam disebut sebagai prinsip *tabligh* dan *amanah* (keterbukaan dan akuntabilitas publik).

Contoh lainnya, Dada Rosada terkenal sebagai “Wagiman” (Walikota Gila Taman).¹⁴ Untuk menghadirkan Bandung sebagai kota yang ramah, indah, dan nyaman bagi seluruh warganya, Dada

¹⁴ Pitojo, *Dada Rosada: Hidup Adalah Pilihan dan Proses*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Rosada di mana-mana mencanangkan gerakan menanam pohon dengan melibatkan banyak sekali tokoh agama. Pada saat yang sama, Dada juga memberikan reaksi yang sangat keras terhadap para penebang pohon. Misalnya, tahun 2012, Dada Rosada bereaksi keras ketika mengetahui sejumlah pohon ditebang di lingkungan kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang sedang melakukan pembangunan kampus besar-besaran. Sudah tentu, sebutan "Wagiman" alias Walikota Gila Taman, bukan hanya sebuah sebutan yang tanpa alasan. Sebutan itu merujuk kepada komitmen dan semangat Dada Rosada yang ingin menjadikan Bandung kembali sebagai Kota Kembang.

Hanya saja, sekalipun populer dengan sebutan Wagiman, tetapi Dada Rosada tidak secara spesifik merancang taman-taman kota. Berbeda halnya dengan Ridwan Kamil. Walikota Ridwan Kamil melakukan revitalisasi terhadap taman-taman kota yang ada dengan merancang dan membangun taman-taman secara spesifik dan tematik. Untuk melakukan program revitalisasi taman, Ridwan Kamil tidak banyak menggerakkan para tokoh agama, melainkan lebih banyak menggandeng para arsitek dan pengusaha. Untuk program-program penataan taman kota, Ridwan Kamil tidak menggunakan dana dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), melainkan dari dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan swasta yang peduli terhadap lingkungan dan taman kota.

Pada tahun pertama kepemimpinannya, banyak taman yang disulap menjadi taman-taman tematik dengan desain dan sentuhan yang berbeda. Saat ini, di Bandung sudah tersedia banyak taman tematik. Seperti Taman Jomblo yang ada di bawah jembatan layang Pasopati, Taman Fotografi, Taman Skateboard, Taman Vanda, Taman Pustaka Bunga Cilaki, dan Taman Film yang semua orang boleh menonton film di situ dengan catatan harus memungut sampah terlebih dahulu sebagai semacam tiketnya.

Tentu saja, salah satu taman yang paling monumental adalah taman yang dibangun di depan Masjid Raya Bandung Jawa Barat. Taman ini kini menjadi salah satu taman kebanggaan warga Bandung. Karena letaknya persis di depan Masjid Raya Bandung, taman ini dirancang sebagai taman bernuansa religius, di mana gerbangnya juga dinamai dengan sebutan “Gerbang Iman Takwa”.

Pada masa kepemimpinan Walikota Dada Rosada, salah satu parameter yang selalu digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan bidang agama adalah berprestasi pada ajang MTQ (Musabaqah Tilawatil Qur'an) di tingkat Provinsi Jawa Barat. Karenanya, menjadi juara umum MTQ di tingkat provinsi akan menjadi peneguh atas program Bandung Agamis yang sedang diusung pemerintah. Pada masa kepemimpinan Dada Rosada, Kota Bandung empat kali berturut-turut menjadi juara umum MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat. Yakni tahun 2007 MTQ di Kabupaten Cirebon, tahun 2008 MTQ di Kota Bandung, tahun 2010 MTQ di Kota Depok dan tahun 2012 MTQ di Karawang.

Pada masa kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil, perhatian terhadap MTQ ternyata tidak mengendur. Pada event MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2014, Kafilah Kota Bandung meraih juara umum untuk yang kelima. Dua tahun berikutnya, pada akhir bulan April 2016 lalu di Kota Tasikmalaya, Kafilah Kota Bandung kembali berhasil meraih Juara Umum MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat untuk keenam kalinya. Sekalipun tidak mengusung program berbasis atau bernuansa agama, Ridwan Kamil tetap memberikan perhatian yang besar kepada momen dan event keagamaan seperti halnya MTQ.

Dari beberapa contoh yang sudah dikemukakan, terlihat ada pergeseran gaya kepemimpinan dari Dada Rosada ke Ridwan Kamil. Dada Rosada cenderung lebih suka menghadirkan agama secara formal ke ruang-ruang publik, dengan resiko munculnya isu politisasi dan birokratisasi agama. Sementara Ridwan Kamil cenderung tampak lebih esensialis dengan memilih semangat yang dihadirkan agama tanpa harus memakai bahasa agama secara formal. Karena itu, kepemimpinan Ridwan Kamil cenderung lebih substantif ketimbang Dada Rosada yang lebih mengedepankan formalisme agama. Karenanya pula, program-program Ridwan Kamil, sebenarnya secara substansi banyak mengukuhkan dan menguatkan program yang dirancang Dada Rosada yang masih banyak terjebak di permukaan karena sifatnya yang cenderung formalistik tadi.

Berdasarkan penelusuran diketahui, bahwa ada peran sangat nyata yang dilakukan oleh KH Miftah Faridl sebagai tokoh panutan sekaligus ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung.

Diketahui, KH Miftah Faridl memainkan peran sangat krusial sebagai jembatan yang menghubungkan era Walikota Dada Rosada dengan era kepemimpinan Ridwan Kamil sekarang. Selama ini, KH Miftah Faridl –dalam kapasitasnya sebagai ketua MUI Kota Bandung-- dikenal sebagai pendukung program Bandung Agamis yang diusung oleh Dada Rosada. Pada saat yang bersamaan, KH Miftah Faridl memiliki posisi yang unik, yakni pernah menjadi dosen ITB (Institut Teknologi Bandung) di mana Walikota Ridwan Kamil adalah alumni dari sana. Tambahan pula, sebagai seorang tokoh panutan yang sangat dihormati, KH Miftah Faridl adalah ulama besar yang ucapannya sangat didengar oleh Walikota Ridwan Kamil.¹⁵

Menyadari posisi itu, KH Miftah Faridl kemudian memberikan saran kepada Walikota Ridwan Kamil untuk tetap meneruskan program-program yang dianggap baik yang telah dirintis oleh Walikota sebelumnya. Tampaknya, Ridwan Kamil mengikuti apa yang disarankan oleh KH Miftah Faridl dengan kemudian meneruskan beberapa program yang pernah dilakukan pada masa Walikota Dada Rosada. Hanya saja, Ridwan Kamil tampak lebih memberikan pembobotan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Dada Rosada sebelumnya, dengan tanpa harus melabelinya sebagai program keagamaan.¹⁶

D. Nasib Saritem di Era Bandung Juara

Terkait isu pembubaran lokalisasi legendaris Saritem¹⁷, Dada Rosada dan Ridwan Kamil memiliki pendekatan yang berbeda. Pada masa pemerintahan Walikota Dada Rosada, salah satu gebrakan untuk menghadirkan wajah Bandung yang agamis adalah menutup lokalisasi paling legendaris di Kota Bandung: Saritem. Penutupan lokalisasi Saritem diawali dengan dideklarasikannya Bandung Maksiat Watch (BMW) bertempat di Masjid Raya

¹⁵ *Wawancara* dengan Ketua Forum Pondok Pesantren Kota Bandung, 2015.

¹⁶ *Wawancara*, dengan Ketua MUI Kota Bandung pada acara “Sialturahmi Ulama-Umaro” di Pendopo Kota, 2014.

¹⁷ Pembahasan yang menarik tentang nasib lokalisasi legendaris yang sudah berumur lebih dari dua abad ini, dapat dilihat dalam Pitoyo, *The End of Saritem* (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2013).

Bandung, 7 April 2007, yang disusul kemudian dengan dialog publik "Menggagas Bandung Bebas dari Maksiat". Deklarasi ini dikukuhkan sebagai wujud kepedulian semua elemen warga Bandung untuk secara bersama-sama mewujudkan Bandung terbebas dari segala bentuk maksiat. Dan, seperti sudah menjadi rahasia bersama, salah satu simbol maksiat utama di Kota Kembang adalah adanya lokalisasi Saritem, yang telah beroperasi sejak ratusan tahun yang lalu. Kurang dari sepuluh hari sejak BMW ini dideklarasikan, Pemerintah Kota Bandung di bawah komando Dada Rosada kemudian secara resmi menutup keberadaan lokalisasi Saritem ini untuk jangka waktu yang permanen. Sebagai bagian dari tindak lanjut setelah penutupan kawasan Saritem itu, Pemerintah Kota Bandung kemudian membeli beberapa bangunan di sana. Walikota Dada Rosada juga memilih mendengarkan masukan dari para tokoh agama di Bandung untuk juga didirikan Sekretariat Utama Kantor Ormas Islam dan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) di sana.¹⁸

Hanya saja, sampai pemerintahan Dada Rosada jatuh dan berakhir, program penutupan dan penataan lokalisasi Saritem ini belum tuntas, bahkan cenderung kambuh kembali. Masih terjadi praktik prostitusi secara sembunyi-sembunyi. Sementara, pada saat yang bersamaan, rencana untuk menjadikan Saritem sebagai kawasan hijau dan mendirikan Kantor Sekretariat Bersama Ormas Islam juga belum berjalan.

Lokalisasi Saritem yang sudah resmi ditutup pada masa kepemimpinan Dada Rosada ternyata tidak sertamerta tutup sama sekali. Seperti penyakit menahun yang kambuh, praktik prostitusi kembali terjadi di bekas lokalisasi Saritem, walau secara sembunyi-sembunyi. Diakui, menutup lokalisasi ini memang terasa sangat berat. Karena mereka sudah terlalu lama praktik di sana dan masyarakat sekitar juga terbiasa dengan kehidupan itu. Malahan menggantungkan hidup dan nasibnya pada suasana maksiat itu.

Setiap menjelang datangnya bulan Suci Ramadhan, Pemerintah Kota Bandung melakukan razia besar-besaran ke bekas lokalisasi Saritem yang diduga kembali beroperasi. Tak tanggung-

¹⁸ *Wawancara*, dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung, 2015.

tanggung Walikota Ridwan Kamil memimpin langsung razia ini. Apa yang diduga selama ini ternyata benar, bahwa Saritem yang berlokasi di Kecamatan Andir ini secara sembunyi-sembunyi kembali beroperasi. Dalam operasi gabungan yang dipimpin Ridwan Kamil itu ditemukan beragam bukti: alat kontrasepsi, puluhan botol minuman keras, buku catatan harian ‘pelanggan’. Selain itu, ditemukan pula beberapa rumah yang kembali membuka praktik.

Dari beberapa paparan tadi, tampak bahwa persoalan Saritem memang belum sepenuhnya selesai. Hal ini yang ingin dituntaskan oleh Ridwan Kamil, dengan melakukan revitalisasi kawasan Saritem ini. Masterplan revitalisasi Saritem saat ini sedang disiapkan oleh Ridwan Kamil.

Soal revitalisasi kawasan bekas lokalisasi Saritem, Ridwan kamil agak berbeda dengan Dada Rosada. Kalau Dada Rosada lebih memilih mendengarkan masukan dari para tokoh agama dengan mendirikan Kantor Sekretariat Bersama Ormas Islam dan FKUB (Forum Kerukunan Antarumat Beragama) sekaligus menjadikan bekas lokalisasi Saritem sebagai kawasan terbuka hijau, Ridwan Kamil lebih memilih saran dari para sosiolog, seperti halnya Budi Radjab dari Universitas Padjadjaran, yang menyarankan agar bekas lokalisasi Saritem dijadikan sebagai pasar saja. Ridwan Kamil bahkan secara spesifik telah membuat desain, kawasan Saritem ini akan dijadikan sebagai pusat pasar emas, dengan menggaet sebanyak mungkin pekerja lokal. Dengan demikian, kehidupan ekonomi warga di bekas lokalisasi Saritem tetap dapat berjalan. Sebelum menjadikan bekas Lokalisasi Saritem sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), terlebih dahulu Ridwan Kamil ingin menghadirkan solusi ekonomi bagi warga setempat.

E. Toleransi Beragama Era Bandung Juara

Sekalipun tidak mengusung program agama secara formal seperti halnya Dada Rosada, tetapi Walikota Ridwan Kamil tidak meninggalkan warisan dan tradisi baik yang telah dimulai oleh Dada Rosada. Seperti halnya yang selalu diberikan Dada Rosada, Ridwan Kamil pun memberikan bonus luar biasa kepada anggota kafilah MTQ Kota Bandung yang berhasil menjadi juara, yakni ongkos naik haji dan umroh.

‘Tradisi’ Dada Rosada lain yang kini diteruskan oleh Ridwan Kamil adalah memelihara komunikasi dengan para tokoh lintas agama yang ada di Kota Bandung. Meski tak seintensif Dada Rosada, Ridwan Kamil masih tetap memelihara kran-kran komunikasi dengan berbagai tokoh lintas agama di Kota Bandung. Seperti, pada momen peringatan hari besar Natal, Ridwan Kamil mendatangi acara *open house* yang digelar Katedral Santo Petrus, di Jalan Merdeka, Bandung.

Gereja Katolik Santo Petrus Bandung bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung menyelenggarakan program rutin tahunan berbentuk *open house* Natal, sebagai ajang silaturahmi, tatap muka, dan dialog antarumat beragama, dengan suasana kekeluargaan. Acara lintas agama ini, seperti tahun-tahun sebelumnya di masa pemerintahan Dada Rosada, dimeriahkan oleh kelompok marawis (rebana, kasidah) dari Pondok Pesantren Al-Afifiyah pimpinan Wahyu Afif Al Gofiqi, kemudian ada musikalisasi puisi, dan lagu-lagu perdamaian dari Keroncong Jempol Antik yang juga biasa mengisi acara buka puasa lintas agama di Kota Bandung di masa Walikota Dada Rosada.

Acara *open house* ini dirancang untuk menjadi jembatan terciptanya dialog dan komunikasi yang saling menumbuhkembangkan hidup beriman dan bermasyarakat. Katedral Santo Petrus telah menyelenggarakan kegiatan ini sejak enam tahun lalu, terutama menyambut adanya program Bandung Agamis yang diusung Walikota Dada Rosada.

Kegiatan *Open house* yang diselenggarakan di Aula Katedral, dihadiri para tokoh umat beragama Islam, Katolik, Kristen, Budha, Kong Hu Chu, serta tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat di Kota Bandung beserta para tokoh lintas agama. Dalam acara tersebut, Pemerintah Kota Bandung dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menyatakan siap bekerjasama untuk mewujudkan Bandung yang damai, aman, sejahtera, dan mengedepankan toleransi beragama. Sebagai kota yang amat heterogen, Ridwan Kamil menginginkan daerahnya menjadi miniatur toleransi beragama di Indonesia. Alasannya, Bandung dikenal sebagai kota dengan berbagai macam agama dan budaya

tetapi warga kotanya tetap dapat hidup bersama-sama secara damai dan menjunjung toleransi.

Selain itu, ‘tradisi’ Dada Rosada lain yang juga masih diteruskan oleh Ridwan Kamil, meski dengan intensitas yang lebih rendah, adalah mengadakan Silaturahmi Ulama-Umaro setiap menjelang datangnya bulan suci Ramadhan dan Halal Bihalal Idul Fitri. Ridwan Kamil merasa perlu mempertahankan acara ini sebagai media memelihara komunikasi dan toleransi di kalangan umat beragama. Sekaligus sebagai media tempat menyampaikan sejumlah gagasan kepada para tokoh agama. Sebagai contoh, pada acara Silaturahmi Ulama Umaro yang digelar 11 September 2014, Ridwan Kamil mengajukan gagasan agar setiap bulan di setiap kecamatan diadakan acara “Istighotsah Night” untuk melengkapi acara “Culinary Night” yang sudah ada sebelumnya.

Selain itu, Ridwan Kamil juga menyampaikan gagasan untuk membina moral anak-anak remaja yang ada di sekolah, nantinya Pembina Upacara yang diadakan di sekolah diisi oleh para tokoh agama sekaligus dijadikan sebagai media untuk memberikan pencerahan agama kepada anak-anak sekolah itu. Agamawan KH Miftah Faridl menyambut gagasan itu dan meminta MUI Kota Bandung untuk langsung menyiapkan para ulama yang akan bertugas sebagai pembina upacara di sekolah-sekolah, sekaligus memberikan taushiyah kepada seluruh peserta upacara, termasuk tentang toleransi beragama. Gagasan ini menjadi terobosan yang sangat menarik. Sebagaimana diketahui, setiap seminggu sekali, yakni hari senin, seluruh sekolah mengadakan upacara bendera di halaman sekolah masing-masing yang diikuti oleh seluruh warga sekolah.

Sekalipun tidak pernah menyebut dan membawa-bawa agama dalam program pemerintahannya, Walikota Ridwan Kamil tetap mempertahankan sejumlah ‘tradisi’ yang diwariskan Walikota Dada Rosada di mana tradisi itu diselenggarakan oleh Dada waktu itu dalam konteks menegakkan program yang diusungnya, yaitu Bandung Agamis. Terkait upaya memelihara toleransi beragama di tengah masyarakat kota Bandung yang majemuk, dengan konsep Bandung Juara, Walikota Ridwan Kamil tetap menjadikannya sebagai hal penting untuk dipelihara. Sampai di sini dapat dikatakan, bahwa ide-ide dan semangat keagamaan telah

menginspirasi ruang publik Kota Bandung melalui berbagai program yang diusung Walikota Ridwan Kamil di bawah *tagline* Bandung Juara. Hanya saja, program-program tadi diekspresikan dalam bentuk yang universal dan dengan menggunakan bahasa umum yang lebih bisa diterima semua pihak.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, tampak bahwa ada pergeseran gaya kepemimpinan dari Dada Rosada ke Ridwan Kamil. Dada Rosada, dengan *tagline* Bandung Agamis, cenderung lebih suka menghadirkan agama secara formal ke ruang publik, dengan resiko munculnya isu politisasi dan birokratisasi agama. Sementara Ridwan Kamil, dengan *tagline* Bandung Juara, cenderung tampak esensialis dengan lebih memilih semangat yang dihadirkan agama tanpa harus memakai bahasa agama secara formal.

Pada era kepemimpinan Walikota Ridwan Kamil, toleransi beragama tetap hidup dan dijaga dengan baik. Sekalipun untuk mewujudkan hal itu, Walikota Ridwan Kamil tidak melibatkan para tokoh lintas agama seintensif yang dilakukan oleh Walikota Dada Rosada. Dalam pendekatan esensialisme yang diusung Walikota Ridwan Kamil, yang terpenting bukanlah membawa-bawa agama dalam setiap program yang diusung ke ruang publik, terpenting adalah justru mengimplementasikan nilai-nilai yang dikandung agama itu sendiri melalui berbagai program yang nyata-nyata memberikan manfaat kepada warga kota. Seperti mewujudkan wajah kota yang toleran, ramah, bersih, dan indah melalui penataan banyak taman dan fasilitas kota, yang jika berhasil dilakukan maka sesungguhnya itu adalah implementasi nyata dari nilai-nilai agama. Bagi Walikota Ridwan Kamil, lebih dari sekedar menghadirkan agama secara formal, mengimplementasikan esensi ajaran agama dalam kehidupan publik jauh lebih penting daripada sekedar terjebak pada simbol-simbol formal, yang rentan terpeleset menjadi sekedar komoditas politik. []

DAFTAR PUSTAKA

Agus Ahmad Safei dan Julian Millie, "Religious Bandung II: The champion arrives", *Inside Indonesia a Quarterly Magazine on Indonesia*, 2016.

- Bernhadr Platzdasch dan Johan Saravanamuttu, *Religious Diversity in Muslim-majority State in Southeast Asia: Areas of Toleration and Conflict*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2014.
- Gusti A.B. Menoh, *Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsektuler Menurut Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Jose Casanova, *Public Religions in the Modern World*, Chicago: University of Chicago Press, 1994.
- Julian Millie dan Agus Ahmad Safei, “Religious Bandung”, *Inside Indonesia a Quarterly Magazine on Indonesia*, 100. 2010.
- Michael Walzer, *On Toleration*, New Haven: Yale University, 1997.
- Pitoyo, *The End of Saritem*, Bandung: Simbiosis Rekatama, 2013.
- , *Dada Rosada: Hidup Adalah Pilihan dan Proses*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Robin Bush, “Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Simptom? dalam Greg Fealy dan Sally White, *Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia*, Canberra: Australian National University.
- Tod Jones, *Culture, Power and Authoritarianism in the Indonesian State*. Singapore: ISEAS, 2013.
- Yudi Latif, *Tuhan Tidak Partisan: Melampaui Sekulerisme dan Fundamentalisme*, Bandung: Syabas Book, 2013.
- Zainuddin Maliki, *Agama Rakyat Agama Penguasa: Konstruksi tentang Realitas Agama dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Galang.
- , *Agama Priyayi: Makna Agama di Tangan Penguasa*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2004.
- Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme*, Jakarta: Fitrah, 2007.
- , *Pandangan Muslim Moderat: Toleransi, Terorisme, dan Oase Perdamaian*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Irfan Noor, “Identitas Agama, Ruang Publik dan Postsektulerisme: Perspektif Diskursus Jurgen Habermas,” *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol 11, No 1, 2012.
- Setara Institute, “Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2015”, (Jakarta: Setara Institute), Website: <https://id.scribd.com/document/326224645/Indeks-Kota-Toleran-2015-Setara-Institute> (akses, 21 Januari 2016).